

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda. Lokasi geografis daerah menjadi salah satu penyebab perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari daerah berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri memberikan kewenangan masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan daerah menurut undang-undang. Oleh karena itu, daerah juga berhak mengembangkan kebijakan daerah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka sumber pendapatan daerah juga harus bisa menunjang kebutuhan daerah bahkan diharapkan setiap tahun pendapatan tersebut mengalami peningkatan(Suharyadi, 2018).

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Pemerintahan daerah sendiri telah dilaksanakan sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sistem pemerintahan berubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem

desentralisasi. Hubungan keuangan antar pemerintah mengacu pada hubungan keuangan berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara mengenai distribusi pendapatan dan pengeluaran negara (Handayani, 2019).

Tujuan desentralisasi kekuasaan negara adalah agar daerah dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam pengelolaan daerahnya dan diharapkan semakin mandiri sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah negara, baik dalam hal keuangan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah. Ciri dari penerapan rezim desentralisasi adalah pelaksanaan desentralisasi keuangan dari pusat ke daerah (Rafsanjani & Suharno, 2022).

Desentralisasi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan proses yang sangat penting dalam mentransfer sumber daya keuangan ke daerah. Sesuai dengan tujuannya, peningkatan dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar sebagai daerah yang mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumber-sumber penerimaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan untuk kemakmuran masyarakat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah.

Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah kepulauan Nusa Tenggara antara Provinsi Bali di sebelah

barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah timur. Pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi terletak di kota Mataram. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tempat wisata dan juga menjadi daerah tujuan wisatawan baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sehingga pendapatan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat. Pajak juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana tersebut merupakan milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas dana tersebut. Dengan demikian, pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan segala potensi yang ada dapat memberikan gambaran positif tentang tuntutan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, efisien dan efektif, serta kemampuan mengelola sumber daya asli daerah (Asmuruf, 2015).

PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dalam rentang tahun 2018 sampai 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi NTB tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah(Rp/Miliar)
2018	1.660,42
2019	1.807,48
2020	1.815,69
2021	1.888,46

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PAD NTB menunjukkan tren positif dengan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PAD NTB Rp1.660,42. Sementara itu, PAD kembali mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp1.807,48 dan pada tahun 2020 PAD kembali mengalami kenaikan sebesar Rp1.815,69. PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.888,46. Peningkatan pada PAD diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahannya serta meningkatkan Pembangunan daerah.

Dikutip dari suarantb.com, hingga pertengahan 2021, realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB belum mencapai target. Dari target sebesar 50 persen sampai akhir Juni, baru tercapai sekitar 40 persen. Belum pulihnya ekonomi NTB menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target PAD tersebut. Sehingga, Pemprov sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama mengenai pembebasan denda.

Dilansir dari [fitra NTB](http://fitra.ntb.go.id), Tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah otonom kepada pemerintah pusat menjadi salah satu isu sentral sepanjang implementasi desentralisasi. Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih kecil, yang menandakan rendahnya kemandirian daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Peningkatan PAD menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana hal ini dapat dilihat melalui indikator makro yang dapat dianalisis

melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Peningkatan PDRB akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, karena PDRB digunakan untuk mendanai program pembangunan dan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut Almizan (2016) Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin pada pencapaian materi atau hasil kuantitatif saja, namun juga pada peningkatan kehidupan keagamaan, sosial, dan bermasyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi yang muncul justru menimbulkan keterbelakangan, kekacauan, dan penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Islam, adalah proses pengentasan kemiskinan dan penciptaan kedamaian, kenyamanan, dan kehidupan yang berbudi luhur. Dalam pengertian ini, Islam bersifat multidimensi, mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kita bukan hanya kesejahteraan materi di dunia, namun kesejahteraan di akhirat. Keduanya menyatu erat dalam Islam dan saling mempengaruhi.

Dana yang direalisasikan untuk pembangunan bersumber dari penerimaan pemerintah atau keuangan publik. Dalam pemerataan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan islam menekankan dana yang bersumber pada penerimaan negara harus dikelola dengan optimal. Apabila tidak optimal akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah yang akan digunakan sebagai

pembangunan bagi daerah(Wahyuni, 2021). Seperti yang dijelaskan dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 29 Allah SWT berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dilihat dari penjelasan kitab suci di atas, Allah lah yang memerintahkan umat manusia untuk patuh membayar jizya, karena berkaitan dengan optimalisasi keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan utama daerah (PAD).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam 1 (satu) tahun pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang dihitung berdasarkan harga tetap dan diukur dalam satuan rupiah (Mayza et al., 2015). Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) daerah tersebut. Sebagai salah satu indikator ekonomi makro, PDRB pada dasarnya adalah nilai tambah total dari semua sektor ekonomi di suatu wilayah atau nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit ekonomi. PDRB juga menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya pembangunan daerah, sehingga besaran PDRB setiap daerah berbeda-beda tergantung dari potensi dan faktor produksi masing-masing daerah.

PDRB NTB pada setiap tahunnya menunjukkan nilai yang positif, karena selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2

Produk Domestik Regional Bruto provinsi NTB tahun 2018-2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rp/Miliar)
2018	123.965.938,60
2019	132.674.150,90
2020	133.613.744,17
2021	140.153.319,13

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa PDRB NTB menunjukkan pengaruh positif, dimana setiap tahunnya nilai PDRB mengalami peningkatan yang cukup baik dengan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB NTB Rp123.965.938,60. Sementara itu, PDRB kembali mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp132.674.150,90 dan pada tahun 2020 PDRB kembali mengalami kenaikan sebesar Rp133.613.744,17. PDRB paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp140.153.319,13. Dari rentan waktu tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah PDRB yang paling tinggi berada di tahun 2021 sebesar Rp140.153.319,13. Dengan nilai PDRB yang demikian dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi provinsi NTB mengalami masa yang baik atau dengan kata lain bisa dikatakan stabil.

Indeks umum untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nasional atau persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu provinsi atau kabupaten (kota). Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

mempunyai arti yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana output per kapita meningkat secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan mempertahankan kekuatan ekonomi yang mendasari perekonomian riil melalui investasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan. Ukuran keadaan perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Selama periode tertentu, PDB mengevaluasi jenis pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain PDRB, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi PAD. Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi PAD, karena investasi merupakan salah satu faktor makro perekonomian. Investasi adalah pembiayaan satu atau lebih aset yang dimiliki dan umumnya merupakan investasi jangka panjang dengan pengembalian di masa depan. Investasi adalah masalah yang berhubungan langsung dengan harapan keuntungan masa depan dari alat-alat produksi. Pengembalian masa depan yang diharapkan merupakan faktor penting dalam menentukan ukuran investasi. Oleh karena itu, berinvestasi adalah upaya untuk menumbuhkan modal saat ini dan berharap akan bertambah di masa depan.

Investasi juga dapat diartikan sebagai penempatan yang dilakukan pemerintah pusat atas sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka waktu yang lama untuk ditanamkan dalam pembelian surat berharga dan penanaman modal langsung, yang kemungkinan besar akan mendatangkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau nilai ekonomi. atau manfaat lainnya untuk jangka waktu tertentu. Investasi daerah dapat dianggarkan jika jumlah yang dianggarkan termasuk dalam periode akuntansi yang relevan ditentukan dalam peraturan penyertaan investasi modal daerah. Tingkat modal investasi daerah dapat berdampak pada pengeluaran publik (Ifrizal et al., 2014).

Pertimbangan utamanya dalam instrumen investasi adalah apakah instrumen tersebut mampu memberikan retur setinggi mungkin dengan risiko serendah mungkin. Keuntungan yang tinggi akan diperoleh jika modal yang masuk mencapai hasil yang maksimal (Tianto, 2022).

Investasi di NTB pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3

Investasi provinsi NTB tahun 2018-2021

Tahun	Investasi (Rp/Juta)
2018	4.135.073,4
2019	3.518.964,0
2020	6.582.379,2
2021	9.090.453,8

Sumber: National Single Window for Investment (NSWi)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan investasi di provinsi NTB mengalami fluktuatif, nilai investasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun

2019 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 investasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 investasi NTB sebesar Rp4.135.073,4, sementara pada tahun 2019 investasi mengalami penurunan yaitu sebesar Rp3.518.964,0. Investasi NTB Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp6.582.379,2 dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp9.090.453,8.

Selain PDRB dan investasi, pengeluaran pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menentukan PAD pada suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah adalah pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti membeli senjata dan peralatan untuk instansi pemerintah, membangun jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri dan militer, dan lain-lain. Selain itu, pengeluaran pemerintah merupakan penentu penting dari tingkat pengeluaran keseluruhan dan juga dapat menjadi penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek. Pengeluaran ini meningkatkan pengeluaran total dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka pendapatan pemerintah pun mengalir melalui PAD. Pengeluaran sektor publik mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus menyediakan barang publik karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dinikmati oleh banyak orang. Dengan demikian, pengeluaran untuk kegiatan sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, dalam hal ini pemerintah daerah mengenakan pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD juga meningkat (Syechalad & Susanti, 2017).

Pengeluaran pemerintah provinsi NTB mengalami kenaikan dan juga penurunan selama rentan waktu dari tahun 2018-2021. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pengeluaran pemerintah provinsi NTB dengan waktu tahun 2018-2021 perhatikan tabel dibawah ini.

Tabel 1. 4

Pengeluaran pemerintah dari belanja daerah provinsi NTB
tahun 2018-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp/Miliar)
2018	5.239,53
2019	5.148,16
2020	5.199,50
2021	5.545,14

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Belanja daerah provinsi NTB mengalami kenaikan dan penurun pada tahun tertentu. Pengeluaran pemerintah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2019 hal tersebut terjadi akibat adanya anggaran yang tidak terealisasi dengan baik, sementara itu pada tahun 2020 realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah Provinsi NTB Rp5.239,53. Pada tahun 2019 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan Rp5.148,16, sedangkan pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp5.199,50. pengeluaran pemerintah paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.545,14.

Menurut Asmuruf (2015), jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting suatu negara. Para ekonom klasik yang digagas Adam Smith bahkan menganggap populasi sebagai input potensial yang dapat dijadikan faktor

produksi untuk meningkatkan output suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki, semakin banyak tenaga kerja yang dapat kita pekerjakan. Apabila jumlah penduduk terus bertambah maka banyak hal yang perlu direncanakan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk tersebut.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah, ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, dimana ketika usaha semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi (Ariyani et al., 2018).

Pendapatan suatu daerah dapat berasal dari kegiatan masyarakatnya dalam perekonomian baik berupa pemungutan pajak, retribusi, dan lain-lain. Memiliki jumlah penduduk yang banyak berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas perekonomian di daerah tersebut dan peningkatan pendapatan daerah. Apabila jumlah penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, melalui pemungutan pajak dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah (Fauzan, 2022).

Jumlah penduduk yang terus bertambah ini tentunya memberikan tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesejahteraan di tempat kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan

kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik serta pemerataan upah bagi pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Pertumbuhan penduduk dapat dianggap sebagai pendorong pembangunan karena peningkatan angkatan kerja dapat meningkatkan output dan memperluas pasar.

Untuk melihat laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk provinsi NTB tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2018	5.013.687
2019	5.070.385
2020	5.125.622
2021	5.405.385

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi NTB setiap tahunnya mengalami kenaikan pada jumlah penduduk, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk NTB sebesar 4.955.578 jiwa, dimana setiap tahunnya terus meningkat. jumlah penduduk paling tinggi berada di tahun 2021 yaitu sebesar 5.405.385 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat diharapkan hal tersebut dapat memberikan dampak positif untuk pendapatan asli daerah di Provinsi NTB itu sendiri dengan mengoptimalkan kualitas penduduknya.

Bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diwarnai dengan munculnya masalah-masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor

menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan misalnya permasalahan yang umum terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yang berdasar pada latar belakang yang ada antara lain:

1. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh variabel investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi NTB

Sebagai pedoman untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi penulis/peneliti

Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan untuk memenuhi syarat sebagai kelulusan sarjana serta penelitiannya berguna untuk orang lain.

3. Bagi Pembaca

Untuk menambah informasi, wawasan, sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan sebagai referensi skripsi atau penelitian yang berkaitan tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).